

IMPLEMENTASI GRADUASI SEJAHTERA MANDIRI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN

Fitria Nurhayati ^{1*}, Catur Suwastanto, SIP, MSi ², Steelyana Indriasari, SP, MSi ³
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani Klaten
*fitriawidanarko@gmail.com

ABSTRAK

Dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia melaksanakan beberapa program penjaminan dan pengamanan sosial bagi keluarga miskin, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mempermudah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi graduasi sejahtera mandiri program keluarga harapan pada masa pandemi covid 19 di kecamatan klaten tengah kabupaten klaten. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk mengetahui implementasi PKH selama pandemi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta divalidasi dengan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan empat variabel utama dalam implementasi: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Birokrasi. Komunikasi online berjalan lancar meski ada kendala alat komunikasi bagi KPM. Sumberdaya memadai, termasuk pengetahuan dan kemampuan menggunakan teknologi sehingga memungkinkan pendampingan secara daring. Disposisi pelaksana program ramah dan jujur, dan birokrasi terlibat secara aktif. Namun terdapat kekurangan dalam pendampingan optimal bagi KPM yaitu kendala dalam berkomunikasi. Sehingga, disarankan untuk meningkatkan kegiatan P2K2 secara tatap muka setelah pandemi untuk memaksimalkan graduasi PKH menuju kemandirian sosial masyarakat.

Kata-kata Kunci: Implementasi, PKH, Covid-19, Graduasi

ABSTRACT

In response to the Covid-19 pandemic, the Indonesian government implemented several social safety and security programs for low-income families, including the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan, PKH). This program aims to improve living standards and facilitate access to education, health, and social welfare services for beneficiary families (Keluarga Penerima Manfaat, KPM), while reducing poverty and social inequality. This study aims to assess the implementation of the independent welfare graduation of the PKH during the Covid-19 pandemic in Klaten Tengah sub-district, Klaten district. The research employs a descriptive qualitative method with purposive sampling to evaluate the implementation of PKH during the pandemic. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and validated using data source triangulation. The study results indicate four main variables in the implementation process: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucracy. Online communication was effective, despite some challenges with communication tools for the KPM. Resources were adequate, including knowledge and technological capabilities, enabling online mentoring. Program implementers were friendly and honest, and the bureaucracy was actively involved. However, there were shortcomings in optimal mentoring for KPM, particularly related to communication tool issues. It is recommended to enhance face-to-face P2K2 activities post-pandemic to maximize PKH graduation towards social independence.

Keywords: Implementation, PKH, Covid-19, Graduation

PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menaruh perhatian yang besar terhadap penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 Alinea Keempat (Mawardi, 2013).

Dalam upaya pembangunan yang dilakukan saat ini, pemerintah selalu berupaya keras untuk mengatasi kemiskinan yang menyebabkan kurangnya kesejahteraan masyarakat agar dapat menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan. Meskipun demikian, masalah kurangnya kesejahteraan di masyarakat masih menjadi perhatian yang serius hingga saat ini.

Dalam berbagai aspek, penyebab utama kemiskinan atau kurangnya kesejahteraan adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Arlina dkk., 2021). Menurut Chriswardani (2005), kemiskinan adalah kondisi di mana terjadi kekurangan hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, yang erat kaitannya dengan kualitas hidup.

Pandemi virus Covid-19 yang melanda dunia, termasuk di Indonesia, sejak tahun 2020 telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Penerapan pembatasan aktivitas publik yang secara sementara mengurangi penyebaran virus, juga membawa dampak sosial yang cukup besar, terutama pada sektor ekonomi.

Banyak usaha yang harus menghentikan operasinya, menyebabkan hilangnya pekerjaan dan peningkatan angka pengangguran, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan. Dampak ini juga merambat hingga ke Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten pada tahun 2020, seperti yang terlihat pada tabel 1, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk adanya intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang hadir di seluruh kecamatan di kabupaten Klaten.

PKH, sering disebut sebagai program pemberdayaan, memberikan akses kepada anggota masyarakat yang tidak berdaya. Ife (2002) mengemukakan bahwa keberdayaan meliputi beberapa aspek, di antaranya keberdayaan dalam menentukan pilihan dan kesempatan dalam hidup, keberdayaan dalam menegakkan hak asasi manusia, keberdayaan dalam mendefinisikan kebutuhan, keberdayaan dalam mengemukakan gagasan, keberdayaan terhadap institusi, keberdayaan terhadap sumber-sumber kehidupan, keberdayaan dalam aktivitas ekonomi, dan keberdayaan atas reproduksi. Program PKH

fokus pada memberikan keberdayaan kepada individu maupun komunitas dalam mengatasi berbagai hambatan yang mereka hadapi, termasuk dalam hal menentukan nasib hidup, menuntut hak asasi, mendefinisikan kebutuhan, menyampaikan gagasan, mengatasi ketidakberdayaan akibat institusi sosial, menggunakan sumber daya, berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, dan mengontrol aspek reproduksi mereka (Puteri, 2022).

Jumlah KPM PKH di Kabupaten Klaten menunjukkan fluktuasi KPM PKH secara umum terutama selama masa pandemi Covid 19. PKH memberikan bantuan finansial, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat. Melalui pendampingan yang intensif, PKH bertujuan untuk membantu keluarga miskin mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Fungsi ini menjadi lebih krusial ditengah redupnya perekonomian daerah secara umum selama pandemi Covid-19.

Graduasi merupakan penanda berakhirnya partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam Program Keluarga Harapan, karena mereka tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan atau telah mengalami peningkatan kondisi sosial ekonomi yang diverifikasi melalui proses pemutakhiran data. Graduasi menjadi indikator kinerja untuk sumber daya manusia

pelaksana (SDM) PKH, yang menunjukkan fokus kebijakan PKH bukan hanya pada penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tetapi juga pada upaya mendorong KPM PKH untuk mandiri. Ada dua jenis graduasi: alamiah, ketika KPM PKH tidak lagi memenuhi syarat, dan sejahtera mandiri, ketika mereka telah berkembang secara sosial dan ekonomi. Graduasi Sejahtera Mandiri dapat dilakukan atas inisiatif KPM atau dorongan dari Pendamping Sosial PKH. Graduasi desa di klaten pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data graduasi KPM Kecamatan Klaten Tengah Tahun 2020-2021 Analisis Data, 2023

NO	NAMA DESA	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		GRADUASI ALAMIAH	GRADUASI SEJAHTERA MANDIRI	GRADUASI ALAMIAH	GRADUASI SEJAHTERA MANDIRI
1	Bareng	10	3	1	3
2	Jomboran	6	6	8	0
3	Buntalan	16	3	2	0
4	Gumulan	12	1	6	0
5	Mojayan	13	4	3	6
6	Semangkak	3	1	1	0
7	Kabupaten	4	1	1	0
8	Klaten	3	1	2	0
9	Tonggalan	8	2	2	2
Jumlah Total		75	22	26	11

tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran implementasi graduasi sejahtera mandiri Program Keluarga Harapan pada masa pandemi covid 19 di Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan publik, menurut Mulyadi (2015), mengacu pada serangkaian langkah untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan, yang melibatkan pemahaman terhadap konsekuensi dari pelaksanaan program. Tahapan pengesahan undang-undang, pelaksanaan keputusan oleh instansi terkait, serta evaluasi dan perbaikan kebijakan merupakan bagian integral dari proses implementasi.

Beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan publik yang telah diajukan oleh para ahli, seperti Model Van Meter dan Van Horn, Model Hoodwood dan Gun, Model Goggin Bowman, dan Lester, Model Grindle, Model Elmore dkk, Model Nakamura & Smalwood, dan Model Jaringan, memberikan kerangka kerja yang bervariasi untuk memahami proses tersebut. Perspektif Grindle (2014), misalnya, menekankan pentingnya memahami konteks kebijakan dan implementasi dalam mencapai efektivitas kebijakan. George Edward III dalam teorinya yang lebih dikenal sebagai “teori Edward” menyatakan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* (kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan) (George Edward III dalam *implementing public policy*, 1980). Dikatakan bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (keputusan politikus tidak dapat dilaksanakan

dengan sukses tanpa pelaksanaan yang efektif). Komunikasi (*communication*) sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap (*disposition or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structures*) adalah empat masalah utama agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Komunikasi melibatkan cara penyampaian kebijakan kepada organisasi dan/atau masyarakat, serta respons dari pihak yang terlibat. Sumber daya merujuk pada ketersediaan dukungan, terutama SDM. Disposisi mencakup kesiapan implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan publik dikenal sebagai organisasi birokrasi. Dalam hal ini, PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan fluktuasi tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2021, yang menunjukkan pentingnya program-program seperti PKH dalam mengatasi masalah tersebut. Kriteria penerima PKH meliputi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Proses implementasi PKH mencakup mekanisme penyaluran bantuan, hak dan kewajiban penerima, serta proses graduasi untuk mengidentifikasi penerima yang telah mencapai kemandirian ekonomi. Graduasi

PKH didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tujuan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial. Studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Fadliyaturrohman pada tahun 2018, telah memberikan wawasan tambahan tentang proses graduasi mandiri dari PKH, menyoroti berbagai alasan yang mendasari keputusan penerima untuk mengundurkan diri dari program tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika implementasi program bantuan sosial seperti PKH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena atau situasi tertentu secara mendalam, khususnya dalam konteks kualitas, makna, dan kompleksitasnya. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berfokus pada pengukuran atau generalisasi statistik, melainkan lebih menekankan pada pengumpulan data yang mendalam, analisis yang terperinci, dan interpretasi yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif kualitatif digunakan teknik seperti observasi langsung,

wawancara, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data yang beragam dan mendalam tentang subjek yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan karakteristik, konteks, dan pengalaman subjek penelitian secara holistik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kompleks tentang fenomena yang diteliti. Metode ini sangat berguna dalam konteks penelitian yang kompleks, multi-dimensi, dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan psikologis subjek yang diteliti. Selain mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses penelitian, dilakukan penguraian dan perbandingan fakta-fakta yang ada untuk mencapai kesimpulan yang lebih terperinci dan berbobot.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara tidak terstruktur, dan studi dokumentasi (Abdullah, 2015; Arikunto, 2002; Indrawan & Yaniawati, 2017). Melalui kombinasi teknik-teknik ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan PKH serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dalam memastikan keabsahan data, penelitian ini mempertimbangkan teknik triangulasi yang melibatkan penggunaan sumber lain di luar data itu sendiri, seperti pandangan dari ahli terkait, untuk tujuan pengecekan (Fitrah & Luthfiyah, 2017).

Triangulasi adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan beberapa metode, data, sumber, atau peneliti untuk memverifikasi atau mengonfirmasi kebenaran suatu temuan atau hasil penelitian. Pendekatan ini berasumsi bahwa dengan menggunakan berbagai sumber atau teknik yang berbeda, penelitian akan lebih kuat dan valid karena dapat mengurangi bias atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam satu metode atau sumber data tertentu. Triangulasi tidak hanya dilakukan terhadap sumber data, tetapi juga terhadap teknik dan waktu pengumpulan data guna memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2018).

Proses analisis data dilakukan berdasarkan pendekatan Miles dan Huberman, yang melibatkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Trisilanto, 2015). Dengan demikian, proses ini bertujuan untuk mendalami pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan PKH, sekaligus menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat digunakan sebagai dasar untuk langkah selanjutnya, baik dalam konteks akademis maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, informan utama terdiri dari Kabid Dayalinjamsos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DISSOSP3APPKB) Kabupaten Klaten, Korkab PKH, Kasi Pemerintahan Kecamatan Klaten Tengah, Pendamping PKH Kecamatan Klaten Tengah, Lurah Mojayan Kecamatan Klaten Tengah, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Triangulasi sumber kemudian dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda, namun dengan teknik yang sama. Dengan demikian, peneliti melakukan pengumpulan data melalui sumber yang sama, yaitu dari Pemerintah Kecamatan Klaten Tengah dan jajaran DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti. Berdasarkan hasil triangulasi dari beberapa informan terhadap 4 indikator evaluasi yaitu SDM, Komunikasi, Disposisi, dan Birokrasi, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari masing-masing informan cenderung sama dan konsisten, menunjukkan bahwa jawaban dari informan tersebut valid.

Berdasarkan triangulasi hasil dari beberapa informan diatas terhadap 4 indikator evaluasi antara lain indikator SDM, Komunikasi, Disposisi dan Birokrasi terlihat bahwa jawaban dari masing-masing informan cenderung sama dan konsisten, berarti bahwa jawaban dari informan adalah valid, dapat disimpulkan bahwa diantaranya :

1. Triangulasi Indikator SDM dapat disimpulkan bahwa sangat penting, karena graduasi KPM PKH terutama sejahtera mandiri merupakan proses panjang

sehingga dengan pemahaman tupoksi sebagai pendamping (SDM PKH) kemampuan berkomunikasi dan pengetahuan dari SDM PKH (Pendamping PKH) mampu memberikan pesan, motivasi terkait program graduasi kepada KPM sehingga KPM dengan kesadaran mau mengundurkan diri dari kepesertaan PKH.

2. Triangulasi Indikator Komunikasi sangat penting dan efektif dalam pelaksanaan graduasi Sejahtera mandiri, karena komunikasi yang terarah, kemudian ada tujuannya maka kedua belah pihak bisa saling memahami apa yang menjadi tujuan PKH terutama graduasi Sejahtera mandiri itu tersendiri sehingga graduasi yang dilakukan KPM adalah graduasi berdasarkan kesadaran dirinya.
3. Triangulasi Indikator Disposisi sangat penting karena merupakan kecenderungan dalam melakukan upaya maupun hal yang baik, baik dalam bertindak, maupun bersikap sehingga berjalan baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari proses graduasi yang dilakukan pada masa pandemi covid 19.
4. Triangulasi Indikator Birokrasi merupakan unsur yang sangat penting karena ketika masing masing pihak mampu menjalankan program graduasi PKH sesuai dengan tupoksi masing masing dapat berjalan lancar sehingga banyak KPM yang memiliki kesadaran

diri untuk melakukan graduasi mandiri meskipun dalam masa pandemi covid 19. Meskipun tidak ada kegiatan tatap muka kegiatan FDS atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) tetap berjalan dengan baik melalui daring atau online.

Dalam teori Edward, terdapat empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yakni: “*Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*” Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi dapat dinilai dari pelaksanaan sosialisasi, respon masyarakat terhadap program PKH serta media informasi untuk memperlancar komunikasi dalam masa pandemic Covid 19. Adapun komunikasi yang dilakukan pada proses implementasi program bantuan di Kecamatan Klaten Tengah mengalami perbaikan meskipun dalam masa pandemi yaitu dengan adanya upaya dari pendamping untuk tetap melakukan P2K2 meskipun hanya dengan cara daring / online sehingga masih bisa menumbuhkan rasa kesadaran KPM untuk melakukan graduasi mandiri dengan memanfaatkan teknologi yang ada yaitu melalui aplikasi WhatsApp. Dan membuka sesi pertanyaan bagi KPM yang memiliki kesulitan,

pertanyaan serta permasalahan terkait bantuan sosial PKH. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadliyaturrohman, S.Sos, S.Pd (2018) yang berjudul "Graduasi Mandiri dari PKH". Penelitian tersebut mencatat bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki alasan individu masing-masing terkait dengan keputusan mereka untuk mengundurkan diri dari Program Keluarga Harapan (PKH). Keputusan ini tidak terlepas dari persepsi mereka terhadap kondisi kemiskinan dan kesejahteraan, yang tentunya memerlukan komunikasi yang efektif sebelumnya.

2. Sumber Daya

Sumber Daya dapat dinilai dari kompetensi implementor. Para implementor memiliki pengetahuan umum, keterampilan dalam mengoperasikan komputer umumnya seperti Microsoft Office Word, dan Excel serta sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi. Dibuktikan dengan kontribusi dan sifat pro aktif para implementor yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk anggaran operasional khusus program ini memang tidak ada karena ini merupakan program pemerintah pusat jadi instansi pemerintah di daerah memiliki kewajiban untuk membantu

merealisasikan dan mensupport terhadap proses graduasi PKH. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Willy Tri Hardianto (2014) berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin". Penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan, sumber daya manusia dan non-manusia menjadi aspek krusial. Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada akan memengaruhi berhasil tidaknya proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang kompeten dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk mencegah bantuan yang tidak sesuai sasaran, pendamping sosial PKH secara berkala melakukan pemutakhiran data dan menyelenggarakan pertemuan bulanan secara rutin, bahkan diadakan secara online selama masa pandemi.

3. Disposisi

Disposisi dapat dinilai dari komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi atau sikap para implementor kebijakan program PKH di Kecamatan Klaten Tengah dalam memberikan edukasi sudah baik meskipun hanya dilakukan secara online akan tetapi kegiatan tetap dijalankan sesuai dengan arahan yang berlaku. Temuan dari

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antriya Eka Suwita (2016) berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Blitar". Penelitian tersebut menyatakan bahwa informan, fasilitas, dan kemampuan pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjalankan tugas mereka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

4. Struktur Birokrasi

Evaluasi terhadap struktur birokrasi berdasarkan penilaian narasumber menunjukkan bahwa penilaian terhadap pendamping PKH telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun, dampak pandemi menyebabkan perubahan pendapatan KPM tidak terlalu signifikan, sehingga tingkat graduasi mandiri mengalami penurunan yang sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tutdin, Z (2019) dalam skripsi berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Langs Lama Kota Langsa".

Penelitian tersebut menyatakan bahwa dari aspek pendapatan, tidak terdapat perubahan yang begitu signifikan antara penerima bansos PKH dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Indikator SDM menunjukkan pentingnya pemahaman tupoksi sebagai pendamping PKH, kemampuan berkomunikasi, dan pengetahuan dari SDM PKH dalam memberikan pesan serta motivasi terkait program graduasi kepada KPM. Selain itu, pelaksanaan program di Kecamatan Klaten Tengah selama pandemi COVID-19 berjalan baik berkat adanya SDM yang berkompeten dalam menjalankan program tersebut. Indikator Komunikasi sangat penting dalam pelaksanaan graduasi Sejahtera Mandiri, karena komunikasi yang terarah memungkinkan kedua belah pihak untuk saling memahami tujuan program PKH, terutama graduasi Sejahtera Mandiri, sehingga graduasi dilakukan berdasarkan kesadaran diri KPM. Indikator Disposisi menunjukkan pentingnya sikap yang baik dalam melakukan upaya dan tindakan yang optimal. Proses graduasi yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa disposisi yang baik dari pendamping sosial dan KPM mempengaruhi kesuksesan program tersebut. Indikator Birokrasi merupakan unsur penting dalam menjalankan program graduasi PKH, karena ketika masing-masing pihak mampu menjalankan program sesuai dengan tupoksinya, program tersebut dapat berjalan lancar. Meskipun dalam masa pandemi

COVID-19, kegiatan seperti FDS atau P2K2 tetap berjalan dengan baik melalui daring atau online. Analisis implementasi teknis graduasi KPM PKH pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Klaten Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan program graduasi dilakukan melalui berbagai tahapan, seperti bidik graduasi, sosialisasi graduasi, dan kegiatan P2K2. Pendekatan perilaku digunakan untuk membentuk atau mengubah pola perilaku KPM PKH agar mereka dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Faktor pendorong implementasi teknis graduasi meliputi keterlibatan KPM PKH yang tertib administrasi dan aktif berkomunikasi dengan pendamping sosial. Namun, kendala dalam implementasi teknis graduasi di antaranya adalah terhentinya kegiatan P2K2 atau FDS selama pandemi COVID-19 dan adanya KPM masa transisi komponen pendidikan yang menunjukkan perilaku ketergantungan terhadap bantuan PKH sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat rasa percaya diri KPM agar dapat mandiri tanpa harus terus menerima bantuan PKH.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait pelaksanaan Implementasi Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Klaten Tengah selama pandemi Covid-19. Komunikasi efektif merupakan faktor kunci dalam suksesnya

pelaksanaan graduasi PKH di tengah pandemi. Sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan melalui media sosial, khususnya *WhatsApp*, telah membuktikan efisiensi dalam menjalankan program, meskipun interaksi tatap muka terbatas. Ketersediaan sumber daya yang memadai dan kompetensi SDM terlibat dalam implementasi menjadi pendorong utama kesuksesan. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, hingga KPM, telah memberikan dukungan yang signifikan. Karakteristik positif para implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan keramahan, memberikan dampak yang positif dalam masyarakat. Komitmen dan keterbukaan dari para implementor menciptakan lingkungan yang kondusif bagi KPM. Peran aktif struktur organisasi setempat sangat berpengaruh dalam kelancaran implementasi program. Dukungan dari lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Klaten telah memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi selama pandemi.

Peningkatan kinerja Pendamping Sosial PKH diperlukan, terutama dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada KPM. Kreativitas dalam penyampaian informasi, seperti pembuatan video atau materi edukasi lainnya, perlu ditingkatkan. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih menitikberatkan pada evaluasi kinerja pendamping sosial dan pengembangan teknis pelaksanaan graduasi PKH. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi acuan penting dalam perbaikan dan pengembangan program di masa depan.

REFERENSI

- Abdullah, M. M. (2015). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi ke-5). Rineka Cipta.
- Arlina, G., Guntur, M., & Nain, U. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi kasus: PKH bidang pendidikan). *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 9(2), 70–81. <https://doi.org/10.1234/jisk.2021.9.2.70>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. (2020). *Profil kemiskinan Klaten 2020* (No. 01/12/33/10/Th 2020). <https://klatenkab.bps.go.id/pressrelease/2020/12/23/303/profil-kemiskinan-klaten-2020.html>
- Chriswardani, S. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 121–129.
- Fadliyaturohmah, S. (2018). *Graduasi mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH)*. Perpustakaan Politeknik Kesejahteraan Sosial.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Tindakan kelas dan studi kasus*. CV Jejak.
- Ife, J. (2008). *Community development* (Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2017). *Metodologi penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan* (Edisi revisi). PT Refika Aditama.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2021*. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. (2013).
- Mawardi, I. (2013). *Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1980–2010* [Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta].
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. (2018).
- Puteri, G. C. (2022). Pentingnya penguatan mekanisme dan instrumen resertifikasi/graduasi KPM PKH. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 4(1), 32–46.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Trisilanto, D. A. (2015). *Perbedaan motivasi kerja antara tenaga pustakawan dengan tenaga administrasi* [Skripsi, Universitas Airlangga].